



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD LUTHFI H. RAHMATULLAH
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 231568

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.561.850.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 743.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 28.7 m2/28.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 361.300.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 28.7 m2/28.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 357.300.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 272.000.000**

1. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 61.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.171.446.699****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 6.066.296.699**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.066.296.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.